Form A.00.00 TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan

: PT Bank Perkreditan Rakyat Perdana Cipta Sejahtera

Posisi Laporan · 31 Desember 2022

Alamat : JL HAYAM WURUK NO 41-42 JELUTUNG - KOTA JAMBI JAMBI

Nomor Telepon : 7551277

Penjelasan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa: Faktor Positif Aspek Struktur Tata Kelola adalah Bank senantiasa berpedoman pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi telah berjalan dengan baik. selanjutnya, faktor positif dari aspek Proses Tata Kelola yaitu tugas dan fungsi dari semua bagian sudah dituangkan secara tertulis dan dilaksanakan dengan baik. BPR Perdana Cipta Sejahtera senantiasa mendorong budaya Kepatuhan dan meningkatkan kesadaran resiko, untuk faktor negatif yang dimiliki BPR Perdana Cipta Sejahtera terhadap aspek Proses Tata Kelola yaitu BPR Perdana Cipta Sejahtera perlu melakukan kaji ulang terhadap kebijakan dan SOP yang dimiliki agar selaras dengan ketentuan terbaru dari regulator dan dapat merespon perkembangan, tantangan bisnis dan operasional. Untuk Sisi Faktor Positif dari aspek Governance Output bahwa Bank masih dapat beroperasi dengan baik dan dapat mencetak kinerja yang baik. Kecukupan permodalan masih memadai dan dapat mengcover potensi kerugian dan dikelola dengan baik sesuai dengan skala usaha dan kompleksitasnya. Untuk sisi negatifnya dari aspek Governance Output vaitu selama tahun 2021 masih terdapat pengenaan sanksi dan surat pembinaan dari regulator.

Tanggal Cetak 01/02/2023 10:06:34 WIB Dicetak Oleh muhamad.taufik40@gmail.com 1 dari 1

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perkreditan Rakyat Perdana Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	HENDY SETIAWAN	Direktur Utama	Direktur Utama
2	MUHAMMAD TAUFIK	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

1.Direksi mengelola BPR sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan undang-undang yang berlaku sesuai dengan prinsip Tata Kelola 2.Direksi telah menindaklanjuti temuan audit intern dan auditor eksternal seperti OJK. Direksi telah mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. 3.Meminimalisirkan risiko Kepatuhan pada BPR Perdana Cipta Sejahtera 4. Mengusulkan kebijakan kepatuhan pada prinsip-prinsip kepatuhan yang akan diterapkan oleh Direksi 5. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan di BPR Perdana Cipta Sejahtera

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

1.Direksi memiliki wewenang untuk menetapkan job description 2.Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham 3. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR. 4, Menetapkan prosedur dan kebijakan serta strategi untuk percepatan pertumbuhan BPR Perdana Cipta Sejahtera sesuai dengan RUPS dan aturan perundang-undangan. 5.Mendorong dan mengevaluasi serta mengawasi kegiatan operasional.

Tanggal Cetak 01/02/2023 10:09:08 WIB Dicetak Oleh muhamad.taufik40@gmail.com 1 dari 1

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perkreditan Rakyat Perdana Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	DJUNAID	Komisaris Utama	Komisaris Utama
2	JULIE LO	Komisaris	Komisaris

Rekomendasi Kepada Direksi

1.Melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan,anggaran dasar dan keputusan RUPS. 2.Dewan Komisaris melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan BPR, serta memberikan nasehat kepada Direksi. 3.Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen. 4.Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

1.Memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari pejabat audit intern BPR,auditor ektern,hasil komisarisan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan.
2.Membuat Risalah rapat Dewan Komisaris beserta salinannya. 3. Memastikan bahwa Direksi telah merancang sistem manajemen risiko yang tepat dalam mengelola risiko utama BPR. 4. Meneliti dan menelaah serta memberikan tanggapan atas laporan berkala dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi.

Tanggal Cetak 01/02/2023 10:09:37 WIB Dicetak Oleh muhamad.taufik40@gmail.com 1 dari 1

Tugas dan Tanggung Jawab Komite

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perkreditan Rakyat Perdana Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tanggal Cetak 01/02/2023 10:09:57 WIB Dicetak Oleh muhamad.taufik40@gmail.com 1 dari 1

Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perkreditan Rakyat Perdana Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

BPR tidak memiliki komite

Tanggal Cetak 01/02/2023 10:10:12 WIB Dicetak Oleh muhamad.taufik40@gmail.com 1 dari 1

Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perkreditan Rakyat Perdana Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

BPR tidak memiliki komite

Tanggal Cetak 01/02/2023 10:10:30 WIB Dicetak Oleh muhamad.taufik40@gmail.com 1 dari 1

Form A.02.10

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perkreditan Rakyat Perdana Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Direksi tidak memiliki saham di BPR

Tanggal Cetak 01/02/2023 10:10:46 WIB Dicetak Oleh muhamad.taufik40@gmail.com 1 dari 1

Form A.02.20

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perkreditan Rakyat Perdana Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tanggal Cetak 01/02/2023 10:11:03 WIB Dicetak Oleh muhamad.taufik40@gmail.com 1 dari 1

Form A.03.10

Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perkreditan Rakyat Perdana Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	MUHAMMAD TAUFIK	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	HENDY SETIAWAN	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan

Tanggal Cetak 01/02/2023 10:11:22 WIB Dicetak Oleh muhamad.taufik40@gmail.com 1 dari 1

Form A.03.20

Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perkreditan Rakyat Perdana Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

		Hubungan Keluarga		
No	Nama Anggota Direksi	Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	MUHAMMAD TAUFIK	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	HENDY SETIAWAN	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua antara sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan pemegang saham pengendali.

Tanggal Cetak 01/02/2023 10:11:48 WIB Dicetak Oleh muhamad.taufik40@gmail.com 1 dari 1

Form A.04.10

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perkreditan Rakyat Perdana Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	DJUNAID	10.125.000.000	67,50

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Terjadi penambahan saham pada tahun 2022

Tanggal Cetak 01/02/2023 10:12:09 WIB Dicetak Oleh muhamad.taufik40@gmail.com 1 dari 1

Form A.04.20

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perkreditan Rakyat Perdana Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	DJUNAID	PT BPR Artha Aceh Sejahtera	10,07
2	DJUNAID	PT BPR Anugerah Swakerta	10,00
3	DJUNAID	PT BPR Artha Margahayu	30,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Bapak Djunaid sudah lama menjadi memiliki saham di BPR tersebut

Tanggal Cetak 01/02/2023 10:12:26 WIB Dicetak Oleh muhamad.taufik40@gmail.com 1 dari 1

Form A.05.10

Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perkreditan Rakyat Perdana Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	DJUNAID	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	JULIE LO	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan antara Dewan Komisaris lain dan Direksi

Tanggal Cetak 01/02/2023 10:12:45 WIB Dicetak Oleh muhamad.taufik40@gmail.com 1 dari 1

Form A.05.20

Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perkreditan Rakyat Perdana Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

		Hubungan Keluarga		
No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	DJUNAID	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	JULIE LO	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua antara sesama anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Tanggal Cetak 01/02/2023 10:13:06 WIB Dicetak Oleh muhamad.taufik40@gmail.com 1 dari 1

Form A.06.10

Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perkreditan Rakyat Perdana Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	604609920	2	267296340
2	Tunjangan	2	108000000	2	15000000
3	Tantiem	2	145500000	2	43000000
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	0	0	0	0
	Total		858109920		325296340

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Berdasarkan RUPS Direksi dan Dewan Komisaris hanya mendapatkan remunerasi sesuai dengan yang tertera.

Tanggal Cetak 01/02/2023 10:13:35 WIB Dicetak Oleh muhamad.taufik40@gmail.com 1 dari 1

Form A.06.20

Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perkreditan Rakyat Perdana Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)		
		Direksi	Dewan Komisaris	
1	Perumahan	Direksi tidak mendapatkan fasilitas perumahan	Dewan Komisaris tidak mendapatkan fasilitas perumahan	
2	Transportasi	Direksi tidak mendapatkan fasilitas transportasi	Dewan Komisaris tidak mendapatkan fasilitas transportasi	
3	Asuransi Kesehatan	Direksi mendapatkan fasilitas kesehatan berupa BPJS	Dewan Komisaris mendapatkan asuransi kesehatan hanya berupa BPJS	
4	Fasilitas lainnya	nihil	nihil	

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Berdasarkan hasil RUPS Dewan Komisaris dan Direksi hanya mendapatkan asuransi kesehatan berupa pembayaran BPJS Kesehatan dan tidak mendapatkan fasilitas lainnya.

Tanggal Cetak 01/02/2023 10:13:56 WIB Dicetak Oleh muhamad.taufik40@gmail.com 1 dari 1

Form A.07.00 Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

1 dari 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perkreditan Rakyat Perdana Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

		Perbandingan	
No	Keterangan	(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	3,01	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,23	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,21	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,28	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	3,23	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

untuk gaji tertinggi diberikan kepada Direksi dan untuk gaji terendah diberikan kepada staf PT BPR Perdana Cipta Sejahtera

Tanggal Cetak 01/02/2023 10:14:57 WIB Dicetak Oleh muhamad.taufik40@gmail.com

Form A.08.10 Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perkreditan Rakyat Perdana Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	20-01-2022	2	Pembahasan pencapaian RBB 2021 PT BPR Perdana Cipta Sejahtera
2	13-04-2022	2	Pembahasan target dan pencapaian, TKS dan lainnya
3	25-07-2022	2	Pembahasan target dan pencapaian, TKS dan lainnya
4	16-09-2022	2	Pembahasan tindak lanjut beberapa debitur (Berdasarkan pemeriksaan OJK tgl 13 Mei 2022)

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

dalam satu tahun Dewan Komisaris telah melakukan rapat sebanyak 4 kali.

Tanggal Cetak 01/02/2023 10:15:14 WIB Dicetak Oleh muhamad.taufik40@gmail.com 1 dari 1

Form A.08.20 Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perkreditan Rakyat Perdana Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuens	si Kehadiran	Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	DJUNAID	0	4	100,00
2	JULIE LO	4	0	100,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dikarenakan masih dalam keadaan pandemik covid 19 maka dari itu Bapak Djunaid selaku Komisaris Utama menghadiri rapat dengan virtual.

Tanggal Cetak 01/02/2023 10:16:56 WIB Dicetak Oleh muhamad.taufik40@gmail.com 1 dari 1

Form A.09.00

Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perkreditan Rakyat Perdana Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak terdapat penyimpangan internal fraud

Tanggal Cetak 01/02/2023 10:17:22 WIB Dicetak Oleh muhamad.taufik40@gmail.com 1 dari 1

Form A.10.00

Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perkreditan Rakyat Perdana Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)		
	Perdata	Pidana	
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0	
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	
Total	0	0	

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak terdapat permasalahan hukum yang dihadapi

Tanggal Cetak 01/02/2023 10:36:48 WIB Dicetak Oleh muhamad.taufik40@gmail.com 1 dari 1

Form A.11.00

Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perkreditan Rakyat Perdana Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tanggal Cetak 01/02/2023 10:37:24 WIB Dicetak Oleh muhamad.taufik40@gmail.com 1 dari 1

Form A.12.00

Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perkreditan Rakyat Perdana Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	20220204	Kegiatan Sosial	Dalam rangka menyambut perayaan Imlek,PT.BPR Perdana Cipta Sejahtera memberikan 150 paket sembako	Masyarakat Chinese yang tidak mampu	29.675.150
2	20220427	Kegiatan Sosial	Bakti sosial dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri,PT.BPR Perdana Cipta Sejahtera memberikan 150 paket sembako	Masyarakat yang kurang mampu	29.966.000
3	20220729	Kegiatan Sosial	Bakti sosial dalam rangka HUT BPR Perdana ke-8, memberikan 150 paket sembako	Masyarakat sekitar BPR yang kurang mampu	30.341.022
4	20221227	Kegiatan Sosial	Bakti Sosial dalam rangka merayakan Natal dan Tahun Baru 2022, PT.BPR Perdana Cipta Sejahtera membagikan 150 paket sembako	Masyarakat yang merayakan natal dan tahun baru, yang kurang mampu	29.793.700

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

pemberian 150 paket sembako yang terdiri dari beras, gula, susu,minyak,mie,telur rutin dilakukan oleh BPR Perdana Cipta Sejahtera setiap perayaan hari besar keagamaan.

Tanggal Cetak 01/02/2023 10:37:47 WIB Dicetak Oleh muhamad.taufik40@gmail.com 1 dari 1

Form B.00.00

Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Sendiri (Self Assesment) atas Penerapan Tata Kelola BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR PT Bank Perkreditan Rakyat Perdana Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31-12-2022

Alamat : JL HAYAM WURUK NO 41-42 JELUTUNG - KOTA JAMBI

Nomor Telepon : 7551277

Modal Inti BPR : 18.864.900.233,00

Total Aset BPR : 104.828.556.866,00

Bobot BPR : B

Status Audit Ekstern : Diaudit

Nilai Komposit : 2,0

Peringkat Komposit : 2

Analisis : Berdasarkan Laporan Self Assesment Penerapan Tata Kelola GCG

di PT.BPR Perdana Cipta Sejahtera 1. Nilai Komposit GCG sebesar 1.9 dengan Predikat komposit Baik 2.Dengan adanya SOP GCG PT. BPR Perdana Cipta Sejahtera, tata kelola Bank berjalan baik sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku saat ini. 3.Adanya pedoman untuk Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya secara efektif 4.GCG juga sangat berdampak untuk komitekomite dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan program kerja dan bisa menjadi acuan bagi keputusan Dewan Komisaris. Serta fungsi Kepatuhan, Audit Intern

dan Audit Ekstern akan berjalan sesuai dengan ketentuan GCG.

Tanggal Cetak 01/02/2023 10:38:19 WIB Dicetak Oleh muhamad.taufik40@gmail.com 1 dari 1

Form B.00.01

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Masing-Masing Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perkreditan Rakyat Perdana Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,67	0,85	0,22	1,74	0.348	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi BPR Perdana Cipta Sejahtera sejauh ini telah sesuai dengan peraturan yang berlaku
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,78	0,75	0,20	1,73	0.260	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris BPR Perdana Cipta Sejahtera telah sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	PT.BPR Perdana Cipta Sejahtera tidak memiliki tugas dan fungsi komite
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	1,00	0,80	0,20	2,00	0.200	untuk penerapan benturan kepentingan di BPR Perdana Cipta Sejahtera telah sesuai dan mengikuti aturan dari Otoritas Jasa Keuangan
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	1,10	1,12	0,33	2,55	0.255	Dalam menerapkan fungsi kepatuhan telah sesuai dengan aturan Otoritas Jasa Keuangan
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	0,90	0,80	0,20	1,90	0.190	Dalam menerapkan fungsi audit intern BPR Perdana Cipta Sejahtera telah sesuai dengan aturan Otoritas Jasa Keuangan.
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	1,00	0,80	0,15	1,95	0.049	penerapan fungsi audit ektern pada BPR Perdana Cipta Sejahtera telah sesuai dengan perturan OJK
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	1,00	0,97	0,20	2,17	0.217	Dalam menerapkan manajemen risiko dan pengendalian intern BPR Perdana Cipta Sejahtera selalu mengacu pada aturan Otoritas Jasa Keuangan
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	1,00	0,80	0,25	2,05	0.154	Dalam menentukan batas maksimum pemberian kredit BPR Perdana Cipta telah sesuai dengan atiran Otoritas Jasa Keuangan
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	0,67	0,80	0,20	1,67	0.125	Dalam menentukan rencana bisnis BPR Perdana Cipta Sejahtera telah disesuaikan dengan aturan OJK
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,50	0,90	0,20	2,60	0.195	Untuk Tranparansi kondisi keuangan, non keuangan serta pelaporan internal telah sesuai

Tanggal Cetak 01/02/2023 10:39:00 WIB Dicetak Oleh muhamad.taufik40@gmail.com 1 dari 2

Form B.00.01

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Masing-Masing Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perkreditan Rakyat Perdana Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Nilai Komposit						2.0	
Peringkat Komposit						Baik	

Tanggal Cetak 01/02/2023 10:39:00 WIB Dicetak Oleh muhamad.taufik40@gmail.com 2 dari 2

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perkreditan Rakyat Perdana Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Saat ini di BPR Perdana Cipta Sejahtera telah menerapkan ketentuan tersebut. Dimana saat ini BPR Perdana Cipta Sejahtera memiliki modal inti kurang dari Rp 50 M dan memiliki 2 orang anggota Direksi dan salah satunya bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Untuk saat ini seluruh anggota Direksi BPR Perdana Cipta Sejahtera bertempat tinggal di Kota yang sama
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Anggota Direksi BPR Perdana Cipta Sejahtera tidak ada yang merangkap jabatan baik di Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (Partai politik atau organisasi kemasyarakatan)
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Mayoritas anggota Direksi BPR Perdana Cipta Sejahtera tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajak kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	2	Hingga saat ini Direksi tidak pernah menggunakan penasihat perorangan atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan.
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	2	Seluruh anggota Direksi BPR Perdana Cipta Sejahtera telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah di tetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	1,33	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,67	

Tanggal Cetak 01/02/2023 10:39:29 WIB Dicetak Oleh muhamad.taufik40@gmail.com 1 dari 6

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perkreditan Rakyat Perdana Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Rutin

Tanggal Cetak 01/02/2023 10:39:29 WIB Dicetak Oleh muhamad.taufik40@gmail.com 2 dari 6

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perkreditan Rakyat Perdana Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	2	Direksi BPR Perdana melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen dan tidak memberikan kuasa hukum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	2	Direksi selalu menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan pengawasan OJK.
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	2	Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komasirasi
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	3	Selama ini pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak.
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Direksi BPR Perdana Cipta Sejahtera tidak pernah menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang telah ditetapkan RUPS
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	2	Anggota Direksi BPR Perdana Cipta Sejahtera selalu mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan maupun jenjang organisasi untuk mengikutsertakan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	2	Anggota Direksi BPR Perdana Cipta Sejahtera mampu mengimplementasikan kompetensi yang mereka miliki dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, terutama terkait pemahaman atas ketentuan mengenai priinsip kehati-hatian.
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	2	Direksi BPR Perdana Cipta Sejahtera telah melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja seperti mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.
	Total nilai skala penerapan	17	
	Rata-rata	2,13	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,85	

Tanggal Cetak 01/02/2023 10:39:29 WIB Dicetak Oleh muhamad.taufik40@gmail.com 3 dari 6

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perkreditan Rakyat Perdana Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Rutin

Tanggal Cetak 01/02/2023 10:39:29 WIB Dicetak Oleh muhamad.taufik40@gmail.com 4 dari 6

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perkreditan Rakyat Perdana Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	2	Direksi BPR Perdana Cipta Sejahtera selalu mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada seluruh pemegang saham melalui RUPS
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	Selama ini Direksi cukup mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai kebijakan strategis pada bidang kepegawaian.
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	3	Hasil rapat Direksi telah dituangkan di dalam risalah rapat dan didokumentasikan.
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	2	terkait peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR telah di tunjukkan dengan peningkatan kinerja BPR
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	2	Direksi selalu menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada OJK, Asosiasi BPR di Indonesia, dan satu kantor media.
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	2,20	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,22	

Tanggal Cetak 01/02/2023 10:39:29 WIB Dicetak Oleh muhamad.taufik40@gmail.com 5 dari 6

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perkreditan Rakyat Perdana Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Rutin

Tanggal Cetak 01/02/2023 10:39:29 WIB Dicetak Oleh muhamad.taufik40@gmail.com 6 dari 6

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perkreditan Rakyat Perdana Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	BPR Perdana Cipta Sejahtera memiliki modal inti kurang dari Rp 50 M telah memiliki anggota dewan komisaris 2 orang
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	BPR Perdana Cipta Sejahtera telah mengikuti aturan yang berlaku saat ini, dimana Jumlah komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	2	Anggota Dewan Komisaris BPR Perdana Cipta Sejahtera telah lulus uji kemampuan dan kepatutan, selain itu juga telah di angkat melalui RUPS.
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	2	BPR Perdana Cipta Sejahtera memiliki 2 anggota dewan komisaris dan keduanya bertempat tinggal di provinsi/kota yang sama dengan provinsi/kota lokasi Kantor Pusat BPR
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	dikarenakan BPR Perdana Cipta Sejahtera memiliki modal inti kurang dari Rp50M sehingga tidak memiliki komisaris independen.
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	2	Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	Seluruh Dewan Komisaris BPR Perdana Cipta Sejahtera tidak ada yang merangkap menjadi anggota Dewan Komisaris, Direksi, ataupun pejabat eksekutif pada BPR,BPRS dan/atau Bank Umum.
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Anggota Dewan Komisaris BPR Perdana Cipta Sejahtera tidak tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.

Tanggal Cetak 01/02/2023 10:40:00 WIB Dicetak Oleh muhamad.taufik40@gmail.com 1 dari 6

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perkreditan Rakyat Perdana Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Rutin

Tanggal Cetak 01/02/2023 10:40:00 WIB Dicetak Oleh muhamad.taufik40@gmail.com 2 dari 6

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perkreditan Rakyat Perdana Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	2	berhubung modal inti BPR Perdana Cipta Sejahtera kurang dari Rp50M maka tidak memiliki dewan komisaris independen.
	Total nilai skala penerapan	14	
	Rata-rata	1,56	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,78	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	1	Sejauh ini Dewan Komisaris BPR Perdana Cipta Sejahtera telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi.
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan, mengerahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	2	Sejauh ini Dewan Komisaris BPR Perdana Cipta Sejahtera tidak pernah terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR. Kecuali ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	2	Dewan Komisaris BPR Perdana Cipta Sejahtera selalu memastikan kepada Direksi terkait menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, serta hasil pengawasan OJK.
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris cukup menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

Tanggal Cetak 01/02/2023 10:40:00 WIB Dicetak Oleh muhamad.taufik40@gmail.com 3 dari 6

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perkreditan Rakyat Perdana Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Rutin

Tanggal Cetak 01/02/2023 10:40:00 WIB Dicetak Oleh muhamad.taufik40@gmail.com 4 dari 6

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perkreditan Rakyat Perdana Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Dalam Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis, telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Anggota Dewan Komisaris BPR Perdana Cipta Sejahtera tidak pernah memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR. Serta tidak mengambil dam/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	Anggota Dewan Komisaris telah melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.
	Total nilai skala penerapan	15	
	Rata-rata	1,88	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,75	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	setiap hasil rapat Dewan Komisaris selalu dituangkan dalam risalah rapat dan telah didokumentasikan dengan baik dan jelas.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Tanggal Cetak 01/02/2023 10:40:00 WIB Dicetak Oleh muhamad.taufik40@gmail.com 5 dari 6

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perkreditan Rakyat Perdana Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Rutin

Tanggal Cetak 01/02/2023 10:40:00 WIB Dicetak Oleh muhamad.taufik40@gmail.com 6 dari 6

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perkreditan Rakyat Perdana Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	

Tanggal Cetak 01/02/2023 10:40:24 WIB Dicetak Oleh muhamad.taufik40@gmail.com 1 dari 4

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Rutin

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perkreditan Rakyat Perdana Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Tanggal Cetak 01/02/2023 10:40:24 WIB Dicetak Oleh muhamad.taufik40@gmail.com 2 dari 4

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perkreditan Rakyat Perdana Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Tanggal Cetak 01/02/2023 10:40:24 WIB Dicetak Oleh muhamad.taufik40@gmail.com 3 dari 4

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

: PT Bank Perkreditan Rakyat Perdana Cipta Sejahtera Nama Lembaga Jasa Keuangan

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Rutin

Tanggal Cetak 01/02/2023 10:40:24 WIB Dicetak Oleh muhamad.taufik40@gmail.com 4 dari 4

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perkreditan Rakyat Perdana Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	2	Terkait benturan kepentingan BPR Perdana Cipta Sejahtera telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	2	Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak pernah mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	2	ya, BPR Perdana Cipta Sejahtera selalu mendokumentasikan dengan baik setiap sesuatu yang terjadi terlebih mengenai benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Tanggal Cetak 01/02/2023 10:40:44 WIB Dicetak Oleh muhamad.taufik40@gmail.com 1 dari 4

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

OTORITAS JASA KEUANGAN

Rutin

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perkreditan Rakyat Perdana Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Tanggal Cetak 01/02/2023 10:40:44 WIB Dicetak Oleh muhamad.taufik40@gmail.com 2 dari 4

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perkreditan Rakyat Perdana Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Tanggal Cetak 01/02/2023 10:40:44 WIB Dicetak Oleh muhamad.taufik40@gmail.com 3 dari 4

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perkreditan Rakyat Perdana Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Rutin

Tanggal Cetak 01/02/2023 10:40:44 WIB Dicetak Oleh muhamad.taufik40@gmail.com 4 dari 4

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perkreditan Rakyat Perdana Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.	2	Anggota Direksi BPR Perdana Cipta Sejahtera yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak pernah menangani terkait penyaluran dana.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.		
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	2	Anggota Direksi BPR Perdana Cipta Sejahtera yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami dengan baik terkait peraturan otoritas jasa keuangan dan peraturan perundangundangan lain yang berkaitan dengan perbankan.
3	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	2	Pelaksanaan fungsi kepatuhan di BPR Perdana Cipta Sejahtera telah di bentuk sesuai dengan fungsinya.
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	3	untuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun atau mengkinikan pedoman kerja,sistem, dan prosedure kepatuhan
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	2	BPR Perdana Cipta Sejahtera telah memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	2,20	
	Bobot	0,50	

Tanggal Cetak 01/02/2023 10:41:04 WIB Dicetak Oleh muhamad.taufik40@gmail.com 1 dari 6

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perkreditan Rakyat Perdana Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Rutin

Tanggal Cetak 01/02/2023 10:41:04 WIB Dicetak Oleh muhamad.taufik40@gmail.com 2 dari 6

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perkreditan Rakyat Perdana Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	1,10	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah- langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sudah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR Perdana Cipta Sejahtera telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan di BPR Perdana Cipta Sejahtera melalui sosialisasi maupun pelatihan terkait ketentuan terkini.
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	4	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan secara keseluruhan telah memantau dan menjaga kepatuhan BPR Perdana Cipta Sejahtera. Hanya saja sepanjang tahun 2022 BPR Perdana mendapat surat teguran dari OJK terkait terlambat dalam melakukan pelaporan. hal ini telah menjadi perhatian Direksi dan akan diperbaiki untuk kedepannya.
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Sejauh ini Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah cukup memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan ketentuan OJK dan undang-undang
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Pejabat Eksekutif Kepatuhan telah melakukan review terkait kebijakan,ketentuan,sop yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan OJK dan undang-undang.
	Total nilai skala penerapan	14	
	Rata-rata	2,80	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,12	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	4	sepanjang tahun 2022 sampai dengan posisi bulan berjalan 2022, BPR Perdana Cipta Sejahtera dekenakan sanksi kewajiban membayar atas keterlambatan penyampaian laporan dan kesalahan pelaporan melalui surat pembinaan

Tanggal Cetak 01/02/2023 10:41:04 WIB Dicetak Oleh muhamad.taufik40@gmail.com 3 dari 6

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perkreditan Rakyat Perdana Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Rutin

Tanggal Cetak 01/02/2023 10:41:04 WIB Dicetak Oleh muhamad.taufik40@gmail.com 4 dari 6

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perkreditan Rakyat Perdana Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	2	BPR Perdana Cipta Sejahtera telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris untuk pelaporan 2022
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	4	untuk penyampaian laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan belum pernah dilakukan oleh BPR Perdana Cipta Sejahtera
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	3,33	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,33	

Tanggal Cetak 01/02/2023 10:41:04 WIB Dicetak Oleh muhamad.taufik40@gmail.com 5 dari 6

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perkreditan Rakyat Perdana Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Rutin

Tanggal Cetak 01/02/2023 10:41:04 WIB Dicetak Oleh muhamad.taufik40@gmail.com 6 dari 6

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perkreditan Rakyat Perdana Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).	1	BPR Perdana Cipta Sejahtera memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.		
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	2	Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas auditor intern sesuai dengan peraturan undangundang dan telah di setujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	2	Pejabat Eksekutif Audit Intern telah melaksanakan audit terhadap satuan kerja operasional terkait penghimpunan ataupun penyaluran dana.
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	2	Pejabat Eksekutif Audit Intern BPR Perdana Cipta Sejahtera bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	2	BPR Perdana Cipta Sejahtera telah melakukan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	1,80	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,90	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	2	BPR Perdana Cipta Sejahtera telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentua pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan.

Tanggal Cetak 01/02/2023 10:41:25 WIB Dicetak Oleh muhamad.taufik40@gmail.com 1 dari 6

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perkreditan Rakyat Perdana Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Rutin

Tanggal Cetak 01/02/2023 10:41:25 WIB Dicetak Oleh muhamad.taufik40@gmail.com 2 dari 6

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perkreditan Rakyat Perdana Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Dikarenakan BPR Perdana Cipta Sejahtera memiliki modal inti kurang dari Rp 50 M.
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	Pelaksanaan audit yang dilakukan oleh Pejabat Eksekutif Audit Intern telah dilakukan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	BPR Perdana Cipta Sejahtera secara rutin telah meningkatkan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerpan fungsi audit intern.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	Pejabat Eksekutif Audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawakan fungsi kepatuhan.
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR Perdana Cipta Sejahtera telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,000 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR Perdana Cipta Sejahtera memiliki modal inti kurang dari Rp 50 M

Tanggal Cetak 01/02/2023 10:41:25 WIB Dicetak Oleh muhamad.taufik40@gmail.com 3 dari 6

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

OTORITAS JASA KEUANGAN

Rutin

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perkreditan Rakyat Perdana Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Tanggal Cetak 01/02/2023 10:41:25 WIB Dicetak Oleh muhamad.taufik40@gmail.com 4 dari 6

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perkreditan Rakyat Perdana Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR Perdana Cipta Sejahtera selalu menyampaikan laporan terkait pengangkatan atau pemberhentian Peabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Tanggal Cetak 01/02/2023 10:41:25 WIB Dicetak Oleh muhamad.taufik40@gmail.com 5 dari 6

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern



Rutin

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perkreditan Rakyat Perdana Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Tanggal Cetak 01/02/2023 10:41:25 WIB Dicetak Oleh muhamad.taufik40@gmail.com 6 dari 6

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perkreditan Rakyat Perdana Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	2	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	2	Dalam melaksanakan audit laporan keuangan, BPR Perdana Cipta Sejahtera menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta telah memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	2	Hasil audit dan Management Letter cukup menggambarkan permasalahan BPR dan di sampaikan kepada BPR
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Untuk cakupan hasil audit cukup sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana di atur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Tanggal Cetak 01/02/2023 10:41:42 WIB Dicetak Oleh muhamad.taufik40@gmail.com 1 dari 4

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perkreditan Rakyat Perdana Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Tanggal Cetak 01/02/2023 10:41:42 WIB Dicetak Oleh muhamad.taufik40@gmail.com 2 dari 4

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perkreditan Rakyat Perdana Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,15	

Tanggal Cetak 01/02/2023 10:41:42 WIB Dicetak Oleh muhamad.taufik40@gmail.com 3 dari 4

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perkreditan Rakyat Perdana Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Tanggal Cetak 01/02/2023 10:41:42 WIB Dicetak Oleh muhamad.taufik40@gmail.com 4 dari 4

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perkreditan Rakyat Perdana Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;	2	Dikarenakan BPR Perdana Cipta Sejahtera memiliki modal inti kurang dari Rp 50 M, maka dari BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung Jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Resiko.
	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.		
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	BPR Perdana Cipta Sejahtera telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko, Prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	2	BPR Perdana Cipta Sejahtera telah memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	2	Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman terkait penerapan Manajemen Risiko secara tertulis dan mengevaluasi serta memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.

Tanggal Cetak 01/02/2023 10:42:03 WIB Dicetak Oleh muhamad.taufik40@gmail.com 1 dari 6

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perkreditan Rakyat Perdana Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Rutin

Tanggal Cetak 01/02/2023 10:42:03 WIB Dicetak Oleh muhamad.taufik40@gmail.com 2 dari 6

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perkreditan Rakyat Perdana Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris BPR Perdana Cipta Sejahtera telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	3	BPR Perdana Cipta Sejahtera telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor yang bersifat material.
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	2	BPR Perdana Cipta Sejahtera telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR Perdana Cipta Sejahtera telah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	Saat ini BPR Perdana Cipta Sejahtera memiliki sistem informasi manajemen yang memadai yang menyediakan data dan informasi yang akurat,kini,namun utuh.
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	2	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.
	Total nilai skala penerapan	17	
	Rata-rata	2,43	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,97	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR Perdana Cipta Sejahtera telah menyusun laporan Profil risiko dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR Perdana Cipta Sejahtera selalu menyusun dan melaporkan produk dan aktivitas baru kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Tanggal Cetak 01/02/2023 10:42:03 WIB Dicetak Oleh muhamad.taufik40@gmail.com 3 dari 6

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perkreditan Rakyat Perdana Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Rutin

Tanggal Cetak 01/02/2023 10:42:03 WIB Dicetak Oleh muhamad.taufik40@gmail.com 4 dari 6

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perkreditan Rakyat Perdana Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Tanggal Cetak 01/02/2023 10:42:03 WIB Dicetak Oleh muhamad.taufik40@gmail.com 5 dari 6

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perkreditan Rakyat Perdana Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Rutin

Tanggal Cetak 01/02/2023 10:42:03 WIB Dicetak Oleh muhamad.taufik40@gmail.com 6 dari 6

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perkreditan Rakyat Perdana Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	BPR Perdana Cipta Sejahtera telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup,debitur besar.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	BPR Perdana Cipta Sejahtera telah mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan sop BMPK agar disesuaikan dengan aturan undang-undang.
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	Proses Pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Selama ini BPR Perdana Cipta Sejahtera tidak pernah melanggar dan/atau melampaui BMPK kepada pihak terkait.
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR Perdana Cipta Sejahtera tidak melanggar ataupun melampaui BMPK sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Tanggal Cetak 01/02/2023 10:42:24 WIB Dicetak Oleh muhamad.taufik40@gmail.com 1 dari 4

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perkreditan Rakyat Perdana Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Rutin

Tanggal Cetak 01/02/2023 10:42:24 WIB Dicetak Oleh muhamad.taufik40@gmail.com 2 dari 4

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perkreditan Rakyat Perdana Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,25	

Tanggal Cetak 01/02/2023 10:42:24 WIB Dicetak Oleh muhamad.taufik40@gmail.com 3 dari 4

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perkreditan Rakyat Perdana Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Rutin

Tanggal Cetak 01/02/2023 10:42:24 WIB Dicetak Oleh muhamad.taufik40@gmail.com 4 dari 4

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perkreditan Rakyat Perdana Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	Rencana Bisnis BPR Perdana Cipta Sejahtera telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Rencana Bisnis BPR Perdana Cipta Sejahtera telah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	Rencana Bisnis BPR Perdana Cipta Sejahtera didukung oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat modal dan infrastruktur yang memadai.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	1,33	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,67	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	2	Rencana Bisnis BPR Perdana Cipta Sejahtera disusun dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal, azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian, dan penerapan manajemen risiko.
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	Dewan Komisari telah melakukan pengawasan terkait pelaksanaan rencana bisnis BPR Perdana Cipta Sejahtera
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Tanggal Cetak 01/02/2023 10:50:12 WIB Dicetak Oleh muhamad.taufik40@gmail.com 1 dari 4

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perkreditan Rakyat Perdana Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Rutin

Tanggal Cetak 01/02/2023 10:50:12 WIB Dicetak Oleh muhamad.taufik40@gmail.com 2 dari 4

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perkreditan Rakyat Perdana Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana Bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui aplikasi apolo yang tentunya sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Tanggal Cetak 01/02/2023 10:50:12 WIB Dicetak Oleh muhamad.taufik40@gmail.com 3 dari 4

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR

OTORITAS JASA KEUANGAN

Rutin

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perkreditan Rakyat Perdana Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Tanggal Cetak 01/02/2023 10:50:12 WIB Dicetak Oleh muhamad.taufik40@gmail.com 4 dari 4

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perkreditan Rakyat Perdana Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	BPR Perdana Cipta Sejahtera memiliki pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan dan menghasilkan laporan cukup lengkap, akurat, kini dan utuh.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR Perdana Cipta Sejahtera telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi yang memuat laporan keuangan,susunan pengurus,komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR Perdana Cipta Sejahtera telah menyusun laporan tahunan dengan materi yang mencakup informasi umum,laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan.
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR sesuai dengan ketentuan OJK
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaiman diatur dalam ketentuan OJK
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	2,25	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,90	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Tanggal Cetak 01/02/2023 10:50:36 WIB Dicetak Oleh muhamad.taufik40@gmail.com 1 dari 4

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perkreditan Rakyat Perdana Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Rutin

Tanggal Cetak 01/02/2023 10:50:36 WIB Dicetak Oleh muhamad.taufik40@gmail.com 2 dari 4

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perkreditan Rakyat Perdana Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangi oleh dua orang Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	2	Selama ini BPR Perdana Cipta Sejahtera telah melakukan pelaporan dan penyelesaian pengaduan dan tindak lanjut pelayanan sesuai ketentuan secara tepat waktu.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Tanggal Cetak 01/02/2023 10:50:36 WIB Dicetak Oleh muhamad.taufik40@gmail.com 3 dari 4

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perkreditan Rakyat Perdana Cipta Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Tanggal Cetak 01/02/2023 10:50:36 WIB Dicetak Oleh muhamad.taufik40@gmail.com 4 dari 4

Rutin

LEMBAR PERSETUJUAN & PENANDATANGANAN LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PT. BPR PERDANA CIPTA SEJAHTERA **TAHUN 2022**

JAMBI, 30 Januari 2023

Disetujui dan ditandatangani oleh:

Direktur Utama

Djunaid

Komisaris Utama

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Nama BPR

: Perdana Cipta Sejahtera

Alamat

: Jl. Hayam Wuruk No. 41-42 Jelutung Kota Jambi

No Telp

: 0741-7551277

Posisi Laporan

: 31 Desember 2022

Modal Inti

: Rp 18.864.900.233,-

Total Aset

: Rp 104.828.556.866,-

Bobot BPR

: В

Nilai Komposit

: 1,993

Peringkat Komposit

: 2

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

- 1. Faktor Positif Aspek Struktur Tata Kelola adalah Bank senantiasa berpedoman pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi telah berjalan dengan baik.
- 2. Faktor positif dari aspek Proses Tata Kelola yaitu tugas dan fungsi dari semua bagian sudah dituangkan secara tertulis dan dilaksanakan dengan baik. BPR Perdana Cipta Sejahtera senantiasa mendorong budaya Kepatuhan dan meningkatkan kesadaran resiko.
- 3. Faktor negatif yang dimiliki BPR Perdana Cipta Sejahtera terhadap aspek Proses Tata Kelola yaitu BPR Perdana Cipta Sejahtera perlu melakukan kaji ulang terhadap kebijakan dan SOP yang dimiliki agar selaras dengan ketentuan terbaru dari regulator dan dapat merespon perkembangan, tantangan bisnis dan operasional.
- 4. Untuk Sisi Faktor Positif dari aspek Governance Output bahwa Bank masih dapat beroperasi dengan baik dan dapat mencetak kinerja yang baik. Kecukupan permodalan masih memadai dan dapat mengcover potensi kerugian dan dikelola dengan baik sesuai dengan skala usaha dan kompleksitasnya.
- 5. Untuk sisi negatifnya dari aspek Governance Output yaitu selama tahun 2022 masih terdapat pengenaan sanksi dan surat pembinaan dari regulator.

Jambi, 30 Januari 2023

Hendy Setiawan

Direktur Utama

<u>Djunaid</u> Komisaris Utama